

**AKTUALISASI NILAI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MENGATASI BERBAGAI KRISIS
(Kajian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Kabupaten Lombok Tengah)**

Oleh
Lalu Muh. Danial
Dosen IPDN. Fakultas Politik Pemerintahan

ABSTRAK

Kajian Nilai_Nilai Kearifan Lokal (*local genius*) di Kabupaten Lombok Tengah. Kajian ini berusaha menggali nilai-nilai kearifan lokal yang masih relevan dalam era globalisasi dan otonomi daerah menuju pencapaian visi dan misi bersama berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur. Berbagai nilai kearifan lokal dalam dimensi : politik, sosial, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dapat diaplikasikan dan diimplementasikan. Harapannya agar kemajuan yang dicapai tetap bertumpu dan berkembang diatas nilai-nilai budaya sendiri dan jati diri bangsa Indonesia, sekaligus mengeleminir dampak yang tidak diharapkan dalam pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat umumnya dan di Lombok Tengah khususnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif dan pendekatan historis disamping pendekatan normatif.

Kata Kunci : , Kearifan Lokal, Pemerintahan Lokal.

PENDAHULUAN

Kajian kearifan lokal (*local genius*) disaat-saat dinamika dan perubahan yang terjadi demikian cepat) sangat urgen untuk dilaksanakan agar kemajuan yang dicapai sebagai hasil dari ikhtiar bersama tetap dalam konteks dan berfondasi budaya lokal. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk atau hiterogin. Kondisi sosial budaya yang hiterogin dapat dijadikan sebagai pemicu dan modal dalam meraih cita-cita bersama yaitu “masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir bathin dalam kondisi yang aman dan tentram.

Kondisi yang *hiterogin* tersebut dapat merupakan bahaya laten apabila dikelola kurang bijaksana dapat menimbulkan perpecahan dan bencana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai kondisi sosial buadaya msyarakat diperlukan, salah satunya adalah kearifan lokal di masa lampau. Kearifan lokal di masa lampau tersebut perlu dlestarikan dan diaktualisasikan disesuaikan dengan perkembangan kemajuan dan kondisi kekinian agar dapat dipergunakan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nilai kearifan lokal dibutuhkan dalam menghadapi berbagai gejolak dan permasalahan. Kegagalan pada masa lampau dan hal-hal yang negatif, dikesampingkan dan memadukan langkah dalam kondisi yang harmonis menatap ke depan dengan tidak mengulangi kesalahan masa lampau merupakan tindakan yang bijaksana. Agar mengetahui hal-hal yang kurang baik untuk tidak terantuk pada batu yang sama dan mengetahui hal-hal yang positif guna menjadikan pegangan dalam menapak kedepan dan kemajuan bersama diperlukan pemahaman mengenai nilai-nilai

kearifan lokal. Pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal akan menumbuhkan rasa bangga bertanah air dan rasa percaya diri.

Kelompok masyarakat tertentu harus mengenal jati dirinya dan memiliki rasa bangga dan percaya diri, sebagai spirit dalam menatap masa depannya. Kemajuan yang ingin dicapai adalah kemajuan dengan tetap mempertahankan identitasnya, ,maju dan berdiri diatas budaya sendiri dengan menerima nilai-nilai positif dari luar dan terintegrasi utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penting untuk dilakukan penelitian nilai-nilai kearifan lokal yang masih relevan di Lombok Tengah , guna menatap masa depan yang lebih cerah.

Pendekatan budaya dan kearifan lokal juga dapat dipergunakan untuk mengatasi gejolak dan konflik sosial bersifat vertikal maupun konflik horizontal. Konflik vertikal dan konflik horizontal merupakan reaksi atas ketidakpuasan masyarakat atas berbagai kebijakan dan dampak kebijakan serta keterlambatan merespon isu dan atau kurang tepatnya menangani isu-isu yang berkembang. Adanya perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat dalam berbagai bidang seperti : sosial, budaya, ekonomi, dan politik., dan penanganan yang tidak cepat, kurang tepat pola pendekatan menyebabkan adanya pihak-pihak yang tersinggung atau merasa dirugikan.

Kearifan lokal masih banyak yang dapat diterapkan dalam masa kemajuan dan era globalisasi. Apabila masing-masing pihak memegang dan melaksanakan berbagai petuah dan kearifan lokal dalam menghadapi konflik, permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang merasa dikalahkan atau dirugikan (*win-win solution*). Ambil saja

contoh prinsip (*sesenggak*) “*Adiqsa tao jauq aiq*” (supaya kita dapat membawa air, maksudnya membawa kesejukan dikala menghadapi masalah); maksudnya dalam menghadapi perselisihan, masing-masing menghadapi dengan kepala dingin dan menyejukkan seperti membawa air. Bukan dengan memproppokasi sehingga suasana semakin memanas dan membakar semangat dan emosi. Banyak lagi ajaran-ajaran kearifan lokal yang dapat diaktualisasikan menghadapi keadaan.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk diteliti terkait dengan nilai-nilai lokal dan perubahan bentuk-bentuk birokrasi di Lombok Tengah, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Apakah ada nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diaktualisasikan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam kehidupan bermasyarakat di Lombok Tengah ?

Kepemimpinan Pemerintahan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia

Bangsa Indonesia yang terdiri dari beratus-ratus suku bangsa yang memiliki kearifan lokal tentang kepemimpinan dan kehidupan bermasyarakat pada masing-masing sukunya. Hanya saja kurang digali secara ilmiah oleh para ahli Indonesia. Salah satu contoh adalah kearifan lokal tentang kepemimpinan suku Jawa yang dikenal dengan Hasta Brata Atau Delapan Tuntunan Laku Bagi Pemimpin. Pemimpin di Suku Dayak dituntut untuk memiliki 6 karakter yakni : **Mamut Menteng** (gagah perkasa dalam sikap dan perbuatan); **Harati** (pandai); **Bakena** (tampan/cantik, dan bijaksana); **Bahadat** (beradat); **Bakaji** (berilmu tinggi dalam spiritual); **Barendeng** (mampu mendengarkan informasi dan kebutuhan warga) (Sumber : www.nia-riwut.com). Suku Minangkabau memiliki kearifan lokal yang berkaitan dengan kepemimpinan yakni “ kepemimpinan **Tungku Tigo Sajaringan (Tali Tigo Sapolin)** yang terdiri dari Ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai. (Sumber : Yulizal Yunus Dt.Rajo Bagindo dikutip dari www.wahana-budaya-indonesia.com). Suku Sunda memiliki kearifan lokal yang berkaitan dengan kepemimpinan yakni : “ **Nyantri, Nyakola, Nyunda**”. Artinya pemimpin harus taat **beragama, berpendidikan, dan menghormati dan menghayati budaya Sunda**. (Sumber : Asep Salahudin dikutip dari gicara.com/leadership/tradisi-kepemimpinan-sunda.html#). Suku Batak Toba mengenal lima jenis kepemimpinan yakni raja huta (pemimpin tertinggi di suatu huta), raja horja (pemimpin gabungan

beberapa huta), raja bius (raja yang memimpin upacara dalam persekutuan bius), *Raja Parbaringin* (pemimpin upacara keagamaan), *Raja Maropat* (para pemimpin yang secara struktural dibentuk oleh Raja Sisingamangaraja XII). (Sumber www.bonpasnews.com/2010/10/kepemimpinan-pada-suku-batak-toba.html). Kepemimpinan yang *Hasta Brata* (Delapan Watak) yang harus dimiliki oleh pemimpin yang menggambarkan sifat-sifat alam raya yang tergambarkan dari delapan dewa, yakni : 1). Batara Wisnu : simbol bumi/tanah ; 2). Batara Bayu : simbol angin/maruto. 3). Batara Baruna : simbol air/laut ; 4). Batara Ratih/Chandra : simbol bulan; 5). Batara Surya : simbol matahari. 6). Batara Indra : simbol langit/angkasa; 7). Batara Brama : simbol api/agni/dahana; 8). Batara Kartika/Ismaya : simbol bintang

Kearifan lokal (*local genius*) menurut Poespowardjojo (dalam Rahyono, 2009: 7) adalah kecerdasan manusia yang dimiliki oleh sekelompok (etnis) manusia yang diperoleh melalui pengalaman hidupnya serta terwujud dalam ciri-ciri budaya yang dimilikinya. Dapat diartikan bahwa seorang anggota masyarakat yang berbudaya menjadi cerdas berkat pengalaman hidup yang dihayatinya. Kearifan dalam budaya merupakan bentuk kecerdasan yang dihasilkan oleh masyarakat pemilik kebudayaan yang bersangkutan. Kearifan lokal adalah merupakan kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup. Kearifan lokal secara substansial merupakan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Geerts, 2007)

Menurut Poespowardjojo (1986: 30), kearifan lokal memiliki ketahanan terhadap unsur-unsur yang datang dari luar dan mampu berkembang untuk masa-masa mendatang. Kepribadian suatu masyarakat ditentukan oleh kekuatan dari luar. Jika kearifan lokal hilang atau musnah, kepribadian bangsa pun akan memudar.

Sebagaimana dipahami, dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan

mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan. Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata sosial budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama.

METODE

Metode kajian yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dengan “mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. “Beberapa diskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan” (Sukmadinata, 2008 ; 60) dalam Swetha 2014 : 88 dan dalam Tuty Suciaty Razak 2014 : 103). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif serta melakukan pendekatan-pendekatan secara hisyoris dan normatif. Data yang diperlukan mencakup data primer dan data sekunder yang digali melalui metode studi kepustakaan dan dokumen, pengalaman terpetik (*best practise*), observasi, kuesioner, wawancara terstruktur dan wawancara mendalam (*indepth interview*), diskusi dengan pihak-pihak terkait. Sumber Data : Naskah kuno, Literatur, Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan serta *best practices* yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan terutama melalui penelusuran Dokumen dan naskah kuno lakukan juga wawancara, dan pengamatan.. Wawancara dilakukan dengan sejumlah responden sesuai kebutuhan. Wawancara secara mendalam (*deep interview*) dilakukan pada responden yang terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat dan budayawan serta mereka yang pernah berkecimpung di Birokrasi pada masa lampau di Lombok Tengah atau paling tidak mereka megetahui informasi penyelenggaraan pemerintahan dimasa lampau. Responden berfungsi sebagai sumber informasi. Metode triangulasi dimana diperlukan konfirmasi dengan sumber data lain sekiranya ditemukan data-data atau informasi yang meragukan. Lokasi Penelitian adalah di Kabupaten Lombok Tengah

HASIL DAN PEMBAHASANA

Gambaran Umum Kabupaten Lombok Tengah

Lombok Tengah merupakan salah satu dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Bara (NTB). NTB terdiri dari dua pulau Besar yaitu Pulau Lombok dan pulau Sumbawa dalam gugusan pulau-pulau di Nusa Tenggara (Sunda Kecil). Kabupaten Lombok Tengah terletak di tengah-tengah Pulau Lombok berada diantara 116 05'-116 Bujur Timur dan 8. Luas wilayahnya 1.208,39 km² (120.839 ha).

Berdasarkan Sensus penduduk tahun 1971, penduduk Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 476.486 jiwa. Jumlah tersebut meningkat menjadi 576.910 jiwa pada sensus penduduk 1980. Pada Tahun 1990 bertambah menjadi 678.746 jiwa dan pada sensus penduduk 2000 bertambah menjadi 745.578 jiwa. Sensus Penduduk di Tahun 2010, jumlah penduduk tercatat sebanyak 860.209 jiwa. Pada tahun 2013 jumlah penduduk terproyeksi sebanyak 881.686 jiwa yang terdiri dari 416.774 jiwa penduduk laki-laki dan 464.912 jiwa penduduk perempuan. , (Sumber : Lombok Tengah Dalam Angka Tahun 2014). Tingkat kepadatan penduduknya sebesar 730 jiwa/km². Kecamatan Praya merupakan kecamatan terpadat, setiap satu km² dihuni oleh 1.738 jiwa, posisi kedua, dan ketiga ditempati oleh Kecamatan Batukliang dan Jonggat. Kecamatan Batukliang Utara merupakan kecamatan yang paling jarang karena untuk satu km² hanya dihuni oleh 268 jiwa penduduk. , (Sumber : Lombok Tengah Dalam Angka Tahun 2014)

Berdasarkan karakteristik wilayah, Lombok Tengah dibagi menjadi tiga wilayah; yaitu ;

1. Wilayah Pembangunan Utara (Kecamatan Kopang, Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, dan Kecamatan Janapria) yang dikenal dengan Zone Pembangunan Wilayah “*Aik Meneng*”(Aik Meneng=Air yang jernih).
2. Wilayah Pembangunan Tengah (Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, Kecamatan Jonggat, Kecamatan Pringgarata) dikenal dengan Zone Pembangunan Wilayah “*Tunjung Tilah*”(Tunjung Tilah = Bunga Teratai yang mekar).
3. Wilayah Pembangunan Selatan (Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan praya Barat, dan Kecamatan Praya Barat Daya) dikenal dengan Zone Pembangunan Wilayah “*Empak Bau*” (*Empak Bau* = Ikan tertangkap).

Pemberian nama zoner tersebut, sesuai dengan semboyan masyarakat Sasak dalam

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Semboyan tersebut adalah ; “*Aik Meneng, Tunjung Tilah, “Empak Bau”*”, artinya dalam menyelesaikan permasalahan, kondisi tetap tenang dan dengan pikiran yang jernih seperti air yang jernih, dan bunga yang hidup diatas air tetap segar dan semerbak tanpa gangguan, yang mengibaratkan masyarakat yang tenang dan kondisi dan situasi aman tanpa merusak dan tanpa kekerasan, tujuan yang hendak dicapai; dipersonifikasi sebagai menangkap ikan (bagaimana strategi dan seninya menangkap ikan agar air tetap tenang dan bunga teratai tidak rudak serta ikan juga tertangkap). Penamaan zone tersebut erat kaitanya dengan kondisi alam dan potensi wilayah.

Birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah (Kab. Loteng) mengalami perkembangan sejalan dengan sistem pemerintahan daerah yang ditetapkan secara nasional. Lembaga pemerintahan atau satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dibentuk dengan mempertimbangkan urusan wajib yang haru ditangani dan potensi wilayah yang tercermin dalam urusan pilihan.

Struktur pemerintahan dibawah Kabupaten seperti Kecamatan dan Desa/ Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Jumlah Kecamatan tidak terjadi perubahan atau pemekaran. Di tingkat Desa dan Dusun/Lingkungan mengalami perubahan dengan alasan peningkatan efektifitas pelayanan, pemerataan pembangunan, peningkatan aksesibilitas, dan kemudahan operasional pembangunan. desa/kelurahan tapi bahkan sampai tingkat dusun/ lingkungan. Pada thun 2010 diresmikan pemekaran desa sebanyak 15 desa sehingga jumlah desa/kelurahan pada tahun 2013 menjadi 139 Dessa/kelurahan (12 Kelurahan), terbagi dalam 1.678 dusun dan 66 lingkungan (peningkatan jumlah dari 1.354 dusun 59 lingkungan keadaan tahun 2010).

Pegawai Negeri Sipil Daerah pada tahun 2013 berjumlah 11.414 orang , terdiri dari 4.003 orang perempuan, laki-laki 7.311 orang., dengan tingkat pendidikannya sebagai berikut :1). SD, SLTP 286 orang.; 2). SLTA : 2.556 orang; 3). DIPLOMA I-II : 1.845 orang.; 4) DIPLOMA III 770 orang.; 5). DIPLOMA IV / S1 5.649 orang dan 6). S2 / S3 : 308 orang.(Sumber Kabupaten Dalam Angka Thn 2014)

Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2013, sebanyak 50 orang anggota yang berasal dari 13 partai besar. 30 orang diantaranya berpendidikan Diploma IV/S1, 12 orang berpendidikan SMU sampai D III, dan tiga orang berpendidikan S2. Anggota DPRD perempuan

sebanyak empat orang. (Sumber Kabupaten Dalam Angka Thn 2014)

Jumlah dan jenis dinas/instansi yang dibentuk tidak terlepas dari kepentingan daerah yang disesuaikan dengan potensi yang ada, bahkan untuk dinas/instansi pada tahun 2008 kembali mengalami perubahan yakni mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008. Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 32 buah.

Terkait mengenai asal usul pemberian nama suku bangsa Sasak dan Pulau Lombok, para ahli berbeda pendapat. Dokumen resmi yang menyebut “Lombok” dan “ Sasak” untuk nama Pulau dijumpai dalam buku “*Negarakertagama (Decawarnana)*” .Dalam lontar itu *Lombok Mirah*” untuk “*Lombok bagian Barat*” dan kata : “*Sasak Adi*” untuk “*Lombok bagian Timur*”. ...Pulau ini dinamakan pulau Sasak, oleh karena pulau ini di zaman dulu ditumbuhi hutan belantara yang sngat rapat, merupakan dinding. Dari kata *Seksek* inilah timbul nama Sasak untuk pulau ini. Dr R. Goris menguraikan arti kata Sasak secara etimologi ; Sasak adalah kata Sansekerta, yang berasal dari kata Sahsaka, Sah = pergi, saka = asal. Jadi orang Sasak adalah orang yang pergi dari negeri asal dengan memakai rakit sebagai kendaraan, pergi dari Jawa dan mengumpul di Lombok. Pendapat Goris ini dapat dibuktikan dengan silsilah para bangsawan, hasil sastra tertulis yang digubah dalam bahasa Jawa Madya dan huruf Jejawan (huruf Sasak).(Depdiknas NTB, 1988: 9).

Pendapat Dr R. Goris diatas terkait asal usul kata Sasak sebagai nama suku bangsa yang mendiami pulau Lombok secara etimologi; kata Sasak berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu kata “Sahsaka”, Kata Sahsaka berasal dari kata Sah dan Saka. Sah = pergi, saka = asal. Jadi orang Sasak adalah orang yang pergi dari negeri asal yaitu Pulau Jawa dengan memakai rakit sebagai kendaraan, pergi dari Jawa dan mengumpul di Lombok. Berbeda dengan pendapat Van Teeuw, yang menyatakan bahwa

Sasak berasal dari keadaan penduduk asli pulau ini yang memakai kain *tembasaq* (kain putih).

Perulangan dari kata *tembasaq* menjadi *saqsaq*= Sasak. Pendapat lain menyatakan bahwa kata “Sasak’ untuk nama Pulau Lombok ialah nama kerajaan yang pertamanya ada di Lombok. Kerajaan Sasak itu menurut P. De Roo DeLa Faille berada disebelah Barat Daya dari Pulau Lombok..(Depdiknas NTB, 1988:10).

Pendapat dalam kutipan tersebut kurang dapat diterima, apakah karena memakai kain putih (tembasak) lantas dipakai sebagai nama suku

bangsa. Faktanya juga bahwa pakaian tradisional Sasak lebih dominan warna hitam (pakaian lambung untuk perempuan dan bebek kain komaq untuk laki-laki). Demikian juga kalau diambil dari nama kerajaan Lombok dan Kerajaan Sasak yang pernah ada, akan timbul lagi pertanyaan; mengapa pulau tersebut dinamakan Kerajaan Lombok dan Kerajaan Sasak ?. Penulis sendiri berpendapat bahwa istilah “*sasak*” itu mendekati kebenaran seperti yang diungkapkan oleh Dr R. Goris, Menurut penulis, kata “*Sasak*” dalam bahasa Jawa berarti “rakit” yang terbuat dari bamboo untuk “menyeberang”. Sependapat dengan Goris, Lukman tokoh masyarakat Sasak mengatakan bahwa “pada jaman dahulu orang yang pertama datang sebagai penghuni Pulau Lombok, datang dengan menumpang sebuah rakit yang berarti ‘Sasak’, oleh karena itulah maka nama penduduknya dinamai orang Sasak. (Lukman: 2005:3). Lebih lanjut Lukman menjelaskan bahwa :

nama Sasak dan Lombok mempunyai kaitan yang erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Ia terjalin menjadi satu, yang berasal dari kata “*Sa’sa’ lombo’*” (dari bahasa Sasak) yang berarti sa’=satu, dan *Lombo’*=lurus.

Kata *Lombo’* dalam tulisan lama, juga dalam kamus Dr R Goris, *Beknopt Sasaksch-Nederlandsch Woordenboek*, terdapat kata “*Lombo’*” ditulis dengan tanda hamzah, yang berarti *Rechts*=Lurus. Kata *Lombo’* dalam tulisan lama, ditulis dengan tanda lain, tidak memakai ‘k’ pada huruf akhirnya. Dalam jaman Portugis kata Lombok ditulis dengan memakai huruf “q” pada huruf akhirnya, menjadi “*Lomboq*” dan terakhir sesudah zaman Belanda, ditulis dengan huruf “k” menjadi “*Lombok*”. Cara menyebut dan membacanya, yang sebenarnya tidak berbunyi :o” dalam logat Jawa, tetapi “oo”, yaitu Sa’sa’ lombo’. Yang kemudian menjadi Sasak Lombo’. Yang berarti satunya lurus. Oleh karena itu nama Lombo’ ini tidak berdiri sendiri dan selalu bergandengan, namun apa sebabnya kemudian kata :Sasak” dijadikan nama suku yang mendiami pulau ini, dan kata :Lombok” dijadikan nama pulau. Memang anatar penduduk dan pulau yang didiami tidaklah berpisah. Sebab kedua kata itu mempunyai kaitan, karena kedua kata ini bagi penduduk Lombok mempunyai arti yang luas, bahkan menjadi “falsafah bagi penduduknya “*Sa’sa’ Lombo’*” yang berarti secara *letterlijk* “satu-satunya kelurusan”, karena nama ini menjadi sumber hidup dan kehidupan suku yang mendiami pulau ini.” (Lukman; 2009:3). Lebih lanjut dicontohkan ketaatan terhadap satu-satunya yang kuasa (Allah), ketaatan kepada pemimpin dan kepada pemerintah.

Penulis pun berpendapat bahwa : “Lombok” berasal dari kata “*Lōmbō’*” (ō dibaca = o dalam kata “toko”) yang berarti “lurus”, ‘*lombok buaq*’= lurus kayak pohon pinang. Lurus, jujur, mengatakan apa adanya dengan tidak memperdulikan resiko. Hal ini didasarkan pada dugaan bahwa, mereka yang meninggalkan tempat asalnya (dari Kerajaan-kerajaan di Jawa), karena tidak betah dengan lingkungannya yang tidak kondusif dan berani mengatakan apa adanya. Mereka meninggal tempat asalnya menggunakan “rakit” atau “*saksak*”. Kelompok tersebut menamakan dirinya orang “Sasak” dan tempat tinggalnya disebut “Palau Lombok”. Pulau Lombok sebelum abad ke 19 lebih dikenal dengan Pulau Seleparang (*Sela*= batu; *parang*=karang). Sesuai nama sebuah kerajaan di sebelah Timur pulau ini. Penduduk setempat lebih populer menyebutnya “*gumi Sasak*” atau “*gumi Seleparang*”. Nama Lombok lebih dipopulerkan oleh orang luar. Kata Sasak dikhususkan untuk menyebut nama suku bangsa yang tinggal di Pulau Lombok. Kata Lombok, dikhususkan untuk menyebut nama “Pulaunya”, untuk konteks kekinian.

Kearifan Lokal di Lombok Tengah

Kearifan Kebudayaan tradisional atau budaya lokal merupakan (*Local knowledge atau localindigenous*), menurut Samsyir dkk, : “adalah semua keakhlian-keakhlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tradisional di daerah, dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya dalam mewujudkan hidup yang harmonis” (Syamsir, dkk; 2004 : hal 8). Lebih lanjut dijelaskan yang intinya bahwa kearifan tersebut merupakan suatu terminologi untuk menggambarkan keluhuran nilai-nilai dan sistem kehidupan masyarakat leluhur dimasa lampau, yang terbukti secara signifikan masih hidup dan memberikan roh dan nilai-nilai baru di era kekinian, dengan catatan diwujudkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial secara konsisten (*teguq*=kuat dan utuh), benar (patut), lurus dan jujur (*bender dan Lomboq*), sungguh-sungguh, serius (*tuhu*), dan bijaksana, penuh rasa kasih sayang (*trasna*). Kearifan lokal singkatnya kearifan tradisional yang sudah dan masih melekat pada kehidupan sosial masyarakat dalam hal ini masyarakat Sasak, baik secara internal (sesama masyarakat sasak) maupun secara eksternal (hubungan masyarakat Sasak dengan etnis lainnya seperti Suku Bali, Jawa, Bima dan lain-lainnya). Terkait dengan uraian tersebut diatas, pembahasan berikutnya difokuskan pada :

- Institusi/Lembaga Adat;
- Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam hubungan sosial yang masih

hidup dan berkembang di masyarakat, maupun yang sudah redup tetapi masih memungkinkan untuk direpitalisasi, c). Hubungan dengan alam sekelilingnya (lingkungan hidup).

a) **Institusi/Lembaga Adat.**

Lembaga Adat kelihatannya sudah mulai tergusurdengan berbagai institusi modern, tetapi Pemerintah Daerah sedang berusaha memfasilitasi untuk menghidupkan dan merepitalisasi lembaga-lembaga tersebut. Lembaga Adat dimaksud, dalam kehidupan masa lampau merupakan lembaga pemerintahan tradisional dan hukum-hukum adat atau norma-norma adat. Dalam menegakkan norma-norma adat dikenal beberapa lembaga adat, yang disebut Krama Adat dalam sebuah Desa Adat. Desa adat inilah yang sudah sirna dan mulai diberikan landasan yuridis formal dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Struktur Organisasi Desa adat yang pernah eksis dimasa lampau adalah : Kepala Desa yang di kenal sebagai Pemekel (Lombok Tengah) atau Pemusung (Lombok Barat); Kepala Dusun atau kepala Kampung disebut Kliang adat; Petugas keamanan yang disebut Lang-Lang Desa, Lang-Lang Gawah (Gawah=Hutan); yang diperbaharui menjadi Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa); Juru Arah (Pembantu Khusus Keliang atau Kepala Desa dalam mengimpormasikan atau menggerakkan masyarakat.

Pengertian “Krama”, memiliki arti “masyarakat” juga aturan atau adat istiadat, hukum, aturan dan dalam arti luas dapat berarti “majelis”. , paguyuban atau perkumpulan. Etnis Sasak mengenal beberapa bentuk Krama baik dalam menjalankan kehidupan maupun dalam menghadapi upacara-upacara dalam menangani musibah “kematian” yang dikenal dengan “*krama urip-pati*”; seperti ;1). *Krama Banjar*, 2). *Krama Gubuk*,3). *Krama Desa*,

Ad.1.). Krama Banjar; merupakan perkumpulan masyarakat adat dalam sekup Kliang atau Dusun atau RW, yang pembentukan dan keanggotaannya didasarkan kepada tujuan yang sama. Keanggotaannya dapat berdasarkan genologis atau keturunan dari suatu rumpun yang sama, puak, agama atau kepentingan sosiologis dan kepentingan emosional lainnya. Biasanya dikordinir oleh mereka yang dianggap atau dituakan dan memiliki wawasan luas. Krama tersebut dapat berbentuk karma urip-pati, sesuai kepentingan dan permasalahan yang sering dihadapi. Karma Banjar dapat berupa Krame Banjar Subak, Krama Banjar Merarik, Krama Banjar Mate, Krama Banjar Haji. tersebut sesuai dengan urusannya. Sebagai ilustrasi keberadaan Krama Banjar tersebut al :Krama Banjar subak, yang menangani masalah irigasi dengan ketuanya

disebut Pekasih, dan kewajiban anggota membayar iuran yang disebut suinis. Tugas dan kewajibannya mengkoordinasi sistem pembagian/penjadwalan pengairan, pemeliharaan dam (pengempel, kebersihan selokan, perbaikan tembuku (tempat pembagian air) dan lain-lainnya. Lembaga ini padamasa Orde Baru dimasukkan dalam salah satu bidang di Organisasi “Persatuan Petani Pemakai Air (P3A)”. Pekasih memiliki jaminan hidup berupa sawah semacam tanah bengkok di Jawa yang dikenal dengan “Pecatu pekasih).

Karma Banjar ini dapat diperluas dan disesuaikan dengan kepentingan bersama untuk kemajuan padamasa yang akan datang seperti “Krama Banjar Pendidikan, Krama Banjar Usaha dan lain-lainnya.

Ad. 2). Krama Gubuk, merupakan lembaga adat tingkat Dusun atau Kampung dengan keanggotaannya seluruh penduduk dusun tanpa kecuali.dan tanpa pandang bulu.Kepengurusannya terdiri dari : Kliang adat, juru arah, penghulu gubuk, mangku (pemegang adat) tingkat dusun, lang-lang (kemanan), penoak (tokoh) agama sitingkat dusun.

Ad 3). Krama Desa; merupakan majelis tingkat desa. Yang terdiri dari : Pemusung (Pemekel) atau Kepala Desa Adat, Juru Arah (pembantu kepala Desa), Lang-Lang Desa (Kepaala Keamanan Desa), Jaksa (Hakim Desa) dan lain-lainnya. Kedepan perlu dipikirkan untuk membentuk suatu krame tingkatan pemerintahan Kecamatan yang dkenal dengan *Krame Paer* dan untuk tingkat Kabupaten yaitu *Krame “Gumi Paer”*.

Ad. b). Kearifan Lokal dalam Hubungan Sosial

Krama dalam pengertian norma sosial, berupa : titi karma (tata), merupakan aturan adat atau *awiq-awiq* yang dibikin berdasarkan kesepakatan adat dari masyarakat adat, berupa: adat *bejiran* (adat bertetangga), adat *betemoe* (adat bertamu), *adat lewat* (adat melewati pekarangan orang), *adat midang* (adat pacaran). Disamping titi karma, dikenal pula *basa karma* dan *aji kram*. *Basa Krama* merupakan aturan atau norma dalam berbahasa, budi pekerti dan sopan santun. Aji krama berkaitan dengan ‘ nilai atau harga adat komunitas, atau terkait status sosial seseorang dikaitkan dengan nilai martabat kekerabatan seseorang berhubungan dengan hak adat dalam komunitas, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat adat secara umum. Tinggi rendahnya aji krama atau nilai adat tersebut tersangkut dalam ketentuan adat perkawinan, “*sorong serah aji krama*”. Mensepakati aji krama berarti menghargai

kedudukan atau martabat seseorang atau komunitas dalam masyarakat adat sehingga tercipta lingkungan yang harmonis,

Bentuk-bentuk kearifan Lokal dalam hubungan Sosial dalam memupuk keharmonisan terutama dibarengi dengan sistem demokrasi dan kebebasan yang dalam prakteknya sering menyimpang dari falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Hubungan kemasyarakatan dimaksud dalam berinteraksi antar suku bangsa dan sesama bangsa yang memiliki budayaberbeda. Hubungan kemasyarakatan tercermin dari panggilan dalam kehidupan sehari-hari baik internal suku bangsa sasak maupun dengan suku bangsa lain atau dengan agama lainnya, yang sifatnya sangat akrab dan penuh toleransi, Panggilan yang dipergunakan adalah “*Semeton*” = saudara dan “*Batur*” = ‘*karib, teman, sahabat*’. Panggilan antar sesama Suku Bangsa Sasak yang seiman dipergunakan panggilan “*Semeton*” = ”Saudara”. Mereka yang diluar Suku Sasak dipanggil dengan sebutan “*Batur*” = ”teman “ (*Batur Bali, Batur Bima, Batur Jawe, Batur Makasar dllnya*).

Antara

“*Semeton* dengan *Semeton* ‘, *Semeton* dengan *Batur*, antara *Batur* dengan *Batur* dalam pergaulan hidup dan persahabatan mereka melakukan apa yang disebut dengan “*Saling Peraq, Saling Pesilaq, Saling Laiq, Saling Ajinin*,

- 1) *Saling Perasaq* : Konsep *saling perasaq* adalah kebiasaan untuk saling memberikan atau mengantarkan hidangan atau makanan sbagai wujud kedekatan dan rasa saling perhatikan dalam ikatan persaudaraan atau persahabatan seseorang. Kebiasaan tersebut biasanya berlaku pada saat merayakan hari-hari besar atau roah (selamatan). Kebiasaan tersebut tidak hanya berlaku dalam suatu komunitas yang sekeyakinan atau seagama atau se suku bangsa, tetapi terutama ditujukan antar ummat yang berbeda. Jika yang bersangkutan seorang Islam, dan memiliki persahabatan tau tetanga/jiran orang Hindu, Budha, Kristen atau Kong Fu Chu, mereka akan saling mengantarkan makanan disaat-saat merayakan hari besar agama mereka masing-masing, ada hajan pesta perkawinan.
- 2) *Saling Pesilaq*; yaitu kebiasaan saling undang untuk *suatu* hajatan keluarga, seperti acara perkawinan, acara potong gigi, acara ngaben untuk Ummat Hindu, dengan menjaga dan menghormati pantangan agama masing-masing. Jika yang punya hajatan orang non muslim dan yang *dipesilaq* adalah orang muslim. Si pengundang non muslim, maka akan diperhatikan persoalan makanan yang akan disajikan dan disiapkan oleh yang puya

hajatan (*handowe karya*) bahan-bahan mentah berupa beras, lauk pauk baik berbentuk daging halal maupun non daging termasuk bumbu-bumbunya, termasuk wadah dan perlengkapannya memaa maupun untuk menghidangkannya bebas dari nakjis. Dalam hal ini biasanya disiapkan oleh yang empunya *gawe* orang yang dari muslim sebagai ran (tukang masaknya) dan orang yang bertanggung jawab terhadap jaminan akan bebas dari masalah nakjis maupun jaminan terhadap makanan tersebut halal. Jika orang Islam mengundang sahabat-sahabat yang dikenal dengan konsep batur . maka sahabat-sahabat dari non muslim dengan senang hati akan menghadirinya dan mnyantap semua hidangan yang disajikan dan dipersiapkan menurut adat Sasak Islam.

- 3) *Saling Ayo/Saling Laiq*; merupakan konsep dalam hbugan kemasyarakatan masyarakat Sasak yaitu saling *kunjungi/melayat* jika ada kerabat dari masing masing sahabat meninggal. Mereka akan saling kunjungi walaupun tanpa pemberitahuan atau undangan khusus, yang penting informasi tersebut nyampai. Kebiasaan tersebut terutama berlaku alam komunitas yang berdekatan, dengan memperhatikan aturan msing-masing agama. Contohnya, apabila seorang sahabat muslim meninggal ,maka sahabat-sahabat non muslim biasanya akan datang melayat ke rumah duka, atau mengantar jenazah sampai ke pemakaman yang mungkin mereka berada diluar pemakaman kalau adat kebiasaan tidak memperbolehkan non muslim masuk kedalam areal pemakaman. Mereka tidak kan ikut ke mesjid atau ke musolla tempat jenazah disholatkan. Demikian jug apabila batur non muslim meninggal, maka batur muslim akan datang melayat ke rumah duka. Dapat juga mereka mengantar sampai ke Seme atau tempat pemakaman “*batur-batur*” non musim. Pada saat mereka pulang diberikan semacam oleh-oleh untuk dirumah berupa buah-buahan atau ayam yang dalam bahasa Sasak dikenal dengan istilah *awon-awon, kaluq-aluq*,
- 4) *Saling Ajinin/Saling Lilaq*; yaitu konsep saling menghormati atau menghargai didalam persahabatan dan dalam pergaulan sehari-hari. Toleransi menjadi jiwa dalam hubungan ini, Contohnya : Jika rombongan penganten Sasaq yang mempergunakan gamelan “*Nyongkolang*” melewati perkampungan yang terdengar adalah gending atau tabuhan dari alat kesenian, sementara sorak sorai dihentikan. Demikian juga bila dari komunitas Bali mengadakan prosesi ngaben atau pejagrahan melewati pemukiman orang muslim atau

perkampungan orang Sasak, maka tabuhan tersebut dihentikan terutama bila sedang waktu sholat tiba.

- 5) *Saling Jangok*, merupakan kebiasaan silaturahmi sama seperti *Saling Ayo/Saling Laiq* tetapi lebih mendalam. Kebiasaan Silaturahmi ini erat kaitannya kalau ada salah seorang kerabat sedang mendapat musibah sebagai tanda ikut bersimpati dan ikut memberikan doa,
- 6) *Saling Bait*, yaitu saling mengambil dalam adat perkawinan terutama perkawinan antar suku. Hal tersebut biasanya dikaitkan dengan keberadaan kedua calon mempelai dalam kondisi setara “kupu”. Apabila tidak setara baik dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, ciri-ciri fisik biasanya terutama masalah “agama” mekanisme penyelesaiannya dengan melibatkan pemerintah tingkat desa sampai kecamatan.
- 7) *Saling Bales/Wales*, biasanya konsep Saling Bales ini dijumpai dalam hal silaturahmi dan kunjung mengunjungi dengan membawa buah tangan dan tuan rumah menyediakan pejambeq dalam bentuk hasil pertanian, ternak atau buah-buahan.
- 8) *Saling Saduq*; merupakan ukuran derajat hubungan persahabatan yang intinya saling percaya *mempercayai* antar Semeton, dan batur.
- 9) *Saling Pekiling/Peringat*, merupakan sikap dan *sifat* untuk saling menasehati dan saling mengingatkan antar semeton dan antar semeton dengan batur., disertai perasaan tulus tanpa ada pamrih atau maksud lain.
- 10) *Saling Peliwat*, merupakan konsep hubungan sosial yang berkaitan dengan hukum perdata dan ekonomi. Saling Peliwat maksudnya memberikan bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami kemunduran usaha atau pailit, rugi dalam berdagang. Caranya dengan menunda pembayaran atau kewajiban utangnya untuk sementara sampai usahanya pulih atau ada rizkinya. Dapat juga dilakukan dengan memberikan tambahan barang dagangan dengan pembayaran belakangan.
- 11) *Saling Liliq*, yaitu suatu bentuk pertolongan sesama semeton dan batur dengan membantu membayarkan utang atau kewajiban sahabatnya tanpa *memberatkan* dengan bunga yang tinggi atau ikatan kewajiban lainnya.
- 12) *Saling Sangkul*, yaitu suatu bentuk saling tolong menolong dengan memberikan bantuan materiil terhadap kawan yang sedang menerima dagangan atau usaha untuk melanjutkan usahanya tersebut.

Selaku masyarakat agraris, dengan sistem pengairan yang sebagian besar tadah hujan dan seandainya sudah dibangun saluran irigasi teknis belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Guna meringankan pengolahan sawah dan biasanya mereka berpacu antara mengolah sawah dengan musim hujan yang mulai turun, agar tidak terjadi gagal panen akibat kekeringan karena terlambat tanam padi. Dapat juga karena menyangkut biaya yang tinggi, diantara petani dikembangkan semangat gotong royong dalam bentuk:

- 1). *Besiru*, yaitu bentuk gotong royong bekerja disawah baik dengan tenaga manusia saja atau dengan tenaga hewannya dalam mengolah sawah, menanam, memelihara dan memanen tanpa dibayar. Yang dibantu juga akan membantu semeton atau batur yang telah membantunya.
- 2) *Begae'*, merupakan bentuk gotong royong pada saat panen dengan menerima upah berbentuk uang tetapi tidak memberatkan pemilik sawah.
- 3) *Bederep*, hampir sama dengan begae', bedanya dalam *bederep* mereka menerima imbalan berupa padi hasil panen dengan perbandingan tertentu, Umpamanya bila hasilnya dalam membantu panen sebanyak 100 ikat sehari, mereka menerima 10 ikat. Atau istilah sekarang ngerapeq, bila memperoleh 100 kg, mereka menerima 10 kg dan diambil seketika setelah selesai mereka panen hari itu juga.

Hubungan kemasyarakatan dalam bentuk gotong royong dalam masyarakat Sasak dikenal dengan gerakan : “*Beriuk Tinjal*” = (Serempak bergerak) atau “*Pade Mare*”=(Sama-sama bekerja)

c). Hubungan dengan alam sekelilingnya (lingkungan hidup).

Kearifan lokal yang terkait dengan lingkungan hidup dan alam sekelilingnya, masyarakat Sasak mempunyai konsep harmonisasi dengan lingkungan sekitarnya dengan tidak melakukan tindakan brutal terhadap lingkungannya baik tumbuh-tumbuhan, hewan maupun alam sekelilingnya yang lain. Bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut, seperti :

- 1). Semacam kepercayaan untuk tidak boleh menebang pohon tertentu pada hari tertentu. Menebang pohon bamboo dilarang pada hari Minggu, menebang pohon kayu pada hari Kamis, merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan tulah.(kualat).
- 2). Sebelum melakukan panen, biasanya ada upacara tertentu dan didahului dengan memilih jenis-jenis bulir padi yang baik untuk dijadikan bibit atau dipanen lebih dahulu untuk bibit.

- 3). Setiap penebangan pohon, setelah terpotong biasanya dikasih tanda dengan menaruh ranting yang masih hidup dengan maksud agar segera diadakan penggantinya atau paling tidak kalau bekas potongannya tersebut tumbuh tunas dipelihara.
- 4). Penggunaan pupuk kandang yang diangkut pada musim kemarau kesawah dan larangan membakar bekas tanaman (jerami), tetapi ditumpuk pada suatu tempat.

Kearifan lokal yang diuraikan tersebut diatas, merupakan praktek-praktekkemasyarakatan yang masih berkembang dan sangat perlu direvitalisasi. Beberapa pepatah atau “sesengaq Sasaq” yang syarat makna dan keluhuran nilai, yang perlu di kembangkan seperti ;

- 1). *Adiqsa tao jauq aiq* (supaya kita dapat membawa air); maksudnya dalam menghadapi perselisihan, agar masing-masing menghadapi dengan kepala dingin dan menyejukkan seperti membawa air, bukan dengan mengompori kadaan sehingga suasana semakin memanas dan membakar semangat dan emosi,
- 2). *Bareng anyong saling sedok* (bersama-sama sehidup *semati*), Merupakan prinsip kerjasama dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan mencapai cita-cita luhur dengan saling membantu dan bersama-sama menghadapi masalah dan saling bantu antara satu dengan yang lain,
- 3). *Aiq meneng*, tunjung tilah, empaq bau ; merupakan konsep penyelesaian masalah dengan pola sebaik mungkin (win-win solution), sehingga air tetap jernih (masyarakat tetap tenang) keadaan aman dan tujuan tercapai.

Tata pemerintahan, dan tata kehidupan bermasyarakat telah diatur dan ditata sesuai dengan yang tertera dalam Kitab “*Kotaragama*”. Kotaragama berasal : “ dari kata “ Kotara” = Wilayah dan “gama” = aturan; hukum. Setiap pelanggaran dapat dikenai sanksi adat berupa *dedosan* (denda adat) dan juga dikenai hukuman moral atau sosial berupa *teselong*” (*teselong*=dibuang). (Syamsir, dkk 2004; 9). Kotaragama, merupakan Undang-Undang Dasar yang pernah diterapkan di Bumi Lombok dimasa lampau. Ketentuan-ketentuan dalam kitab tersebut merupakan konsep pemerintahan Majapahit yang diselaraskan dengan Ajaran Islam setelah Islam masuk ke Lombok. Sebagaimana telah disinggung dalam Bab II bahwa Seleparang telah mengadakan perjanjian Bencingah Punan. Salah satu isinya adalah Seleparang akan mengirim utusan untuk mempelajari pemerintahan ke Majapahit. Seleparang merupakan kerajaan yang

berpengaruh dan memiliki hubungan keluarga dengan kerajaan lain di Pulau Lombok, seperti : Kerajaan Pejanggik, Kerajaan Langko, beserta kedemungan atau Kedatuan dibawahnya. Semua berada dibawah higemoni Seleparang. Perjanjian Bencingah Punan antara Seleparang dengan Majapahit, juga mewarnai sistempemerintahan di bawah higemoni Seleparang.

Sistem Pemerintahan dan nilai-nilai yang berlaku di Majapahit juga diterapkan di Kerajaan Seleparang, Kerajaan Pejanggik, Kerajaan Langko, beserta kedemungan atau Kedatuan dibawahnya berada dibawah. Setelah Islam berkembang di pusat kekuasaan tersebut (Kerajaan Pejanggik, Kerajaan Langko), nilai-nilai tersebut di sesuaikan dengan ajaran Islam. Aturan-aturan pemerintahan diselaraskan dengan ajaran agama Islam yang tertera dalam Al Qur’an dan Al Hadist. Sistem pengaturan masyarakat diatur dan tertera dalam Naskah Lontar “Kotaragama” mempergunakan huruf *Jejawan* berbahasa *Kawi* (*Jawa Madya*), berbentuk prosa. (Musium Negeri Propinsi NTB, 1995/1996 : iii). Kotaragama berasal dari kata “ kotara”= wilayah dan kata “gama”= hukum; aturan. Kotaragama adalah ; “aturan atau hukum yang berlaku di suatu wilayah.” Musium Negeri Propinsi NTB, 1996 : h 2)

Perkembangan setelah eksistensi Pejanggik dan Langko berakhir pada akhir abad ke 17 (antara tahun 1692 - 1720) dan masuknya pengaruh kekuasaan Karangasem Bali yang beragama Hindu dan berdirinya Kerajaan Memelaq (Banjar Getas) yang menganut Syari’at Islam. “Kotaragama” tetap diberlakukan bagi Ummat Islam dan bagi Ummat Hindu diterapkan “Kertagama”.

Berdasarkan Naskah “Kotaragama” yang sudah dialih aksara dan alih bahasa oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan dalam hal ini Musium Negeri propinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa butiran nilai kearifan lokal, mengatur tentang :

1. Sifat seorang raja, tata laksana, dan kebijakannya dalam memimpin serta mengatur pemerintahan.
2. Syarat-syarat dan tata cara raja mengangkat pejabat kerajaan seperti; penghulu, jaksa (juru tulis kerajaan), mantra, hakim, duta atau utusan.
3. Sikap dan tingkah laku rakyat terhadap rakyat dan juga raja terhadap rakyatnya serta bagaimana seharusnya raja berlaku adil dan dermawan.
4. Hukum-hukum dan sanksi-sanksi yang menyangkut : pencurian, perkosaan, pembunuhan, perkelahian, perzinahan, sengketa tanah/waris, utang piutang, gadai menggadai, dan lain-lain.

Nilai kearifan lokal yang berhubungan penyelenggaraan pemerintahan dan kepemimpinan diatur dalam “Kotaragama”. Naskah “Kotaragama” merupakan Undang-Undang Dasar bagi masyarakat Sasak pada masa lampau. Di dalamnya diatur mengenai pemimpin, rakyat, dan berbagai ketentuan dalam hubungan kemasyarakatan. Kotaragama menggambarkan tipe seorang pemimpin atau Raja yang ideal dalam menjalankan roda pemerintahan dalam pemimpin atau raja yang : taat menjalankan ajaran Agama (bertaqwa), bersifat sosial (suka bersedekah dan membantu), memberikan pengayoman (perlindungan), berdisiplin terutama terhadap janji yang diucapkan tidak ingkar. Secara terus menerus meningkatkan ilmu pengetahuannya, mencegah terjadinya malapetaka, tidak suka kawin dan adil. Raja di Surya Alam (dimaksudkan di Bumi Seleparang), yang dikurniakan keagungan oleh Allah, sehingga berbeda dengan raja-raja yang lain. Keagungan tersebut diperoleh apabila memiliki sifat dan kepribadiannya yang sangat adil kepada rakyat, taat kepada Allah, selalu memohon ampunan dan berdoa supaya tidak kena aib, senantiasa merendahkan diri. Kotaragama juga memberikan tuntunan sikap seorang raja terhadap rakyat atau abadinya. Disebutkan raja hendaknya : “*hagnyana manda, hagnyana rasa, hagnyana purusa*”.. *Hagnyana Manda* berarti menjamu rakyat. Menjamu rakyat dimaksudkan adalah, pemerintah atau pemimpin jangan memberikan rakyatnya kelaparan. Raja/Pemimpin juga diharapkan; *hagnyana rasa*, berarti merasakan perasaan rakyat, denyut nadi hati rakyat, dan *hagnyana purusa*; maksudnya merangkul kehendak rakyat.

“Kotaragama”, juga memberikan tuntunan bagaimana sikap rakyat/abdi terhadap raja/pemimpinnya. Ada tujuh hal/perkara yang harus diperhatikan, yaitu ; *Anut*, artinya jangan sekehendak hati. *Sadu*, jangan mengambil milik orang lain (sepegangan), jangan mengambil milik raja, *Tuhu*, tetap hati akan kesungguhan atau bersungguh-sungguh, rajin, tekun, ulat. *Guna*, jangan banyak memakan makanan milik orang lain yang dimakan olehnya. *Hamintuhu*, maksudnya loyalitas tunggal, tidak menghamba kepada dua raja. *Kawanten*, maksudnya jangan mengumpat raja. *Jahil*, maksudnya jangan menyampaikan kejelekan ulama atau menjelek-menjelekan pimpinan.

Sifat-sifat kepemimpinan diibaratkan dengan sifat alam semesta, Kotaragama, memberi petunjuk sifat seorang pemimpin/raja agar dapat bersifat sebagai :

- 1) *Giri Suci*; Raja itu ibarat gunung yang suci dan agung.
- 2) *Jaladri*, artinya Raja harus bersifat bagaikan lautan dapat menampung semua hal baik yang amis maupun yang busuk.
- 3) *Bahmi Pawaka*, artinya api besar. Seorang pemimpin (raja), harus dapat menghapus dan menhanguskan yang kotor atau nakjis.
- 4) *Surya*, artinya matahari. Seorang pemimpin hendaknya bersifat sebagai matahari yang memberikan penerangan dan energi untuk kehidupan.
- 5) *Sasangka*, artinya bulan; Seorang pemimpin hendaknya bersifat sebagai bulan yang memberikan penerang di kala kegelapan dan tidak perlu dinyalakan.
- 6) *Nilatadu*, berarti langit biru. Seorang pemimpin hendaknya bersifat sebagai langit biru. Memberi keteduhan dengan tetap memiliki keagungan.
- 7) Seorang raja atau pimpinan hendaknya mantap dalam memberikan keputusan dan ucapannya, seperti halnya *danta danti kusuma warsa*. *Danta* (gading gajah), yang berarti sekali tanggal tidak mungkin tumbuh kembali, *Danti* (ludah), artinya sekali diludahkan tidak mungkin dijilat kembali. *Kusuma* (bunga), maksudnya sekali mekar, pantang mekar dua kali. *Warsa* (hujan) artinya sekali jatuhnya kebumi tidak mungkin naik kembali.
- 8) Seorang raja/pemimpin tidak pantas takut dalam peperangan dan bersifat:” *Bhrahmara puspa micanteh, nagsika prana micanteh, sang wiku yogya micanteh, ratu nrepyuda micanteh*”. *Bhrahmara puspa micanteh*. *Bhrahmara*, artinya : kumbang, tidak ada kumbang takut kepada bunga. *Nagsika* = lalat, tidak ada lalat takut pada batu.

Masih banyak kearifan lokal, yang belum termuat dalam tulisan ini, kiranya peneliti lain dapat memperkaya dan merevitalisasi lebih lanjut hasil penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

- 1) Nilai-nilai luhur “kejujuran” yang tercermin dari nama Suku Bangsa dan nama tempat suku bangsa tersebut (Suku Sasak dan Pulau Lombok), Kejujuran sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Berbagai kearifan lokal dalam pergaulan hidup, dalam menjalankan pemerintahan masih banyak yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan masa kini.

- 3) Nilai-nilai kepemimpinan, hubungan sosial ekonomi yang merupakan kearifan lokal hendaknya di modifikasi dan disesuaikan dengan tuntutan zaman seperti yang tercantum dalam berbagai norma-norma yang mengatur tata krama kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- 4) Diperlukan upaya-upaya pelestarian secara sistematis dan berkesinambungan sehingga generasi mendatang mengetahui jati dirinya dan maju di atas budaya dan jati dirinya.
- 5) Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa memberikan landasan yuridis formal berkembangnya berbagai institusi lokal dan norma-norma yang mulai sirna, sehingga diperlukan fasilitasi dan dukungan pembinaan dari Pemerintah.
- 6) Kepedulian lembaga perguruan tinggi melakukan pengkajian lebih jauh terhadap lembaga adat guna persiapan pelaksanaan pasal 96 sampai dengan pasal 111 UU nomor 6 Tahun 2014. Pasal-pasal tersebut menyangkut keberadaan i Desa Adat,

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, AA.Gde Putra; *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke colonial*, Cetakan iii, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2009.
- Agung, Anak Agung Ketut, *Kupu-Kupu Kuning yang Terbang di Selat Lombok*, Lintasan Sejarah Kerajaan Karangasem, (1661-19500); PT Upada Sastraa, Denpasar, 1991
- Azhar, Haji Lalu Muhamad, *Sejarah Daerah Lombok : Arya Banjar Getas, Bedah Takepan- Babad dan buku Sasak*, PT Intan Sejatri Klaten, Mataram, 2003
- Barbara Kellerman ; “ *Bad Leadership – What it is, How it Happens, Why it Matters*” , 2004